

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dinamika konflik dari pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat sekolah menengah atas dan sederajat di kota Surabaya. Latar belakang dari penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menarik kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari kota ke Pemerintah Provinsi. Dalam penelitian ini, terdapat dua pertanyaan penelitian yaitu bagaimana konflik kepentingan dalam pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah atas dan sederajat di Kota Surabaya, dan apa kepentingan Pemerintah Kota Surabaya terhadap pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah atas dan sederajat. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, peneliti menggunakan teori konflik dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Konflik yang terjadi antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melibatkan beberapa pihak, mulai dari pelajar, wali murid, dinas pendidikan, hingga wali kota. Konflik terjadi karena perbedaan kepentingan terhadap wewenang penyelenggaraan pendidikan menengah atas di Surabaya. Kepentingan Pemerintah Kota Surabaya untuk mempertahankan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah atas adalah agar warga Surabaya mendapatkan layanan pendidikan sampai jenjang SMA/SMK sesuai dengan amanat Peraturan Daerah No 16 Tahun 2012 terkait pengelolaan pendidikan, yang mengamanatkan Pemerintah Kota Surabaya harus menjalankan pendidikan wajib dua belas tahun di Kota Surabaya. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah melaksanakan UU No. 23 Tahun 2014 sesuai aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Politik, Konflik, Pendidikan, Desentralisasi, Implikasi Kebijakan

ABSTRACT

This research aims to explain the dynamics of conflict from the transfer of authority to manage high school and senior high school education in the city of Surabaya. The basic of this research is Law Number 23 of 2014 which draws the authority to manage secondary education from the city to the Provincial Government. In this research, there are two questions. First, how the conflict of interest in the transfer of management authority of senior secondary and equivalent education in the City of Surabaya. Second, what the interests of the City of Surabaya Government towards the transfer of authority of the management of senior secondary and equivalent education. To answer these research questions, researchers used conflict theory with descriptive qualitative research methods. The conflict that occurred between the Surabaya City Government and the Provincial Government of East Java involved several parties, ranging from students, guardians of students, education offices, to mayors. The conflict occurred because of differences in the interests of the authority of the administration of senior secondary education in Surabaya. The interest of the Surabaya City Government to maintain the authority of managing senior secondary education is that Surabaya citizens get education services up to the high school / vocational level in accordance with the mandate of Regional Regulation No. 16 of 2012 related to education management, which mandates that the Surabaya City Government must carry out twelve-year compulsory education in the City Surabaya. Various attempts were made by the Surabaya City Government. Whereas the Provincial Government of East Java is implementing Law No. 23 of 2014 according to applicable regulations.

Keywords: Politic, Conflict, Education, Decentralization, Policy Implications

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi seluruh umat-umatnya.

Skripsi yang berjudul “Rivalitas di Balik Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Studi Konflik Kepentingan dalam Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas dan Sederajat di Kota Surabaya Tahun 2016” merupakan penelitian yang mengupas dinamika konflik yang terjadi dalam pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah atas, yang mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada dan mampu menjadikan pandangan mengenai bagaimana kesuksesan pemerintah kedepannya dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari beberapa pihak yang telah berkenan mencurahkan perhatian atas terselesaikannya penulisan skripsi ini, baik berupa bimbingan, dorongan, motivasi, dan berbagai bantuan lainnya. Pada kesempatan ini sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan semua nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini,
2. Kedua orang tua yaitu Bapak Katimin dan Ibu Dwi Nursasi yang selama ini terus berjuang hingga saya menempuh pendidikan S1,
3. Bapak Dr. Aribowo, Drs., M.S.. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya, memberikan ilmu nya serta memberikan arahan, motivasi, doa, dan masukan yang sangat berpengaruh terhadap penulis.
4. Seluruh teman-teman di Supersquad Academy yang menjadi pelecut bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Surabaya, 6 Juli 2020

Muhammad Amin